BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Pemerintah Kota Bandung

Peneliti melakukan penelitian melalui survey yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bandung sebanyak 14 dinas yang berada di Kota Bandung dan diambil satu sample untuk menerangkan gambaran umum mengenai sejarah Dinas, struktur organisasi Dinas, Job description, aktivitas Dinas yang diambil sample mengenai semua ini yaitu Dinas Pendapatan Kota Bandung yang akan dijelaskan sebagai berikut :

4.1.1 Sejarah Dinas Pemerintah Kota Bandung

1. Dinas Pendapatan Kota Bandung

Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung membawahi 5 (lima) satuan kerja yaitu :

1. Bagian Perpajakan dan Retribusi (BAPAR)
2. Bagian Iuran Rehabilitasi Daerah (IREDA)
3. Bagian Eksploitasi Parkir (BEF)
4. Bagian Perusahaan Pasar (BPP)
5. Bagian Tata Usaha Dalam (TUD)

Pada tahuan 1980, dikeluarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 09/PD 1980 tanggal 10 Juli 1980, dimana Stuktur Organisasi

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung mengalami perubahan, semula membawahi 5 (lima) satuan unit kerja dirubah menjadi 7(tujuh) satuan unit kerja, yaitu:

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pajak
3. Seksi Retribusi
4. Seksi IPEDA
5. Seksi perencanaan, Penelitian dan pembangunan;
6. UPTD Pasar
7. UPTD Parkir dan Terminal

Dalam kegiatan satuan operasional satuan unit kerja tersebut diatas, khususnya dalam bidang pemungutan pajak/retribusi, dipakai sistem **MAPENDA (Manual Administrasi Pendapatan Daerah)** . Dengan sistem MAPENDA, petugas melakukan kegiatan pemungutan pajak/retribusi secara langsung kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi **"door to door"** .

Guna terdapat keseragaman struktur Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yaitu Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 11 Tahun 1989 tanggal 30 Oktober 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Dengan

dikeluarkannya Keputusan Mendagri No. 23 Tahun1989 perlu disusun sistem dan prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih mutakhir sebagai penyempurnaan dari sistem dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Mendagri No. 102 Tahun 1990 Tentang Sistem Prosedur Perpajakan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Wilayah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama **MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah)** .

Dengan diberlakukannya MAPATDA, maka sistem pemungutan pajak/retribusi daerah yang sebelumnya dilakukan secara **"door to door"** menjadi **"self assesment"** yaitu wajib pajak dan wajib retribusi menyetor langsung kewajiban pembayaran pajak/retribusi ke Dinas Pendapatan Daerah.

4.1.2 Struktur Organisasi Dinas

Struktur organisasi merupakan suatu bagian dan uraian tugas yang menggambarkan hubungan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap karyawan yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Struktur organisasi Dinas Pendapatan Kota Bandung dapat dilihat di lampiran.

4.1.3 Job Description

Untuk menunjang Program Kerja tersebut Dinas Pendapatan Kota Bandung melaksanakan Tugas Pokok Seksi sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**

   Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Kepala Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :

   a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Pajak Daerah, Pendapatan Bukan Pajak Daerah.
   b. Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah.
   c. Pelaksanaan koordinasi berkaitan rencana penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Bukan Pajak Daerah dengan Instansi terkait.
   d. Pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pemungutan Pajak Daerah.
   e. Pelaksanaan Evaluasi Pendapatan Daerah secara keseluruhan.
   f. Pembinaan, evaluasi dan Laporan Kegiatan Dinas.
   g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. **Sekretaris**

   Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bagian Sekretariat mempunyai fungsi :

   a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan.
   b. Pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.

c. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Sekretaris dibantu oleh :

a. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok maka Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas Pendapatan.
b. Pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan rencana, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan anggaran.
c. Pengkoordinasian, pengendalian dan penyusunan Laporan Keuangan.
d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, pembinaan, disiplin pengembangan, diklat pegawai dan kesejahteraan pegawai.

b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan kegiatan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan.
b. Pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan meliputi pengelolaan tata usaha, naskah dinas, kearsipan dinas, rumah tangga dinas dan perlengkapan.

3. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Untuk melaksanakan tugas pokok maka Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Rencana Kerja Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program Dinas Pendapatan.
c. Pelaksanaan koordinasi Rencana Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Bukan Pajak Daerah.
d. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan Pengendalian Operasional Pendapatan.
e. Penyusunan konsep kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, maka Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dibantu oleh :

a. Seksi Perencanaan dan Pelaporan

Untuk melaksanaan tugas pokok, maka Seksi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan perencanaan kegiatan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Oprasional.
b. Penyusunan rencana target pendapatan.
c. Pelaksanaan koordinasi rencana target pendapatan dan evaluasi pendapatan.
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
e. Penyusunan konsep program Dinas Pendapatan.

b. Seksi Pengendalian Operasional

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Pengendalian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Program dan Kegiatan Pengendalian Operasional.
b. Pengawasan dan Pengendalian Operasional Bidang Perencanaan., Pengendalian dan Operasional serta Pendapatan Lainnya.
c. Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Bidang Pajak Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana Bidang Pajak Daerah.
b. Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah.
c. Penyelenggaraan Pajak Daerah meliputi pendaftaran, pendataan.
d. penetapan, penagihan dan pembukuan Pajak Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (2) pasal 11, Bidang Pajak Daerah dibantu oleh :

a. Seksi Pendataan dan Penagihan

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Pendataan dan Penagihan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Program dan Kegiatan Pengelolaan, Pendaftaran, Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah.
b. Pelaksanaan administrasi Pajak Daerah.

b. Seksi Penetapan dan Pembukuan

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Penetapan dan Pembukuan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Program dan Kegiatan pengelolaan, penetapan, dan pembukuan Pajak Daerah.
b. Pelaksanaan penetapan dan pembukuan Pajak Daerah.
c. Pelaksanaan Administrasi Penetapan Pajak Daerah dan Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5. Bidang Dana Perimbangan

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Bidang Dana Perimbangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Rencana Kerja Bidang Dana Perimbangan.
b. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
c. Pengendalian, Evaluasi data pelaporan PBB Perkotaan dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
d. Pengkoordinasian kegiatan pemungutan PBB Perkotaan dan Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Dana Perimbangandibantu oleh :

a. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Program dan Kegiatan Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan.
b. Pelaksanaan Penyerahan SPPT PBB.
c. Pengkoordinasian pemungutan PBB dan Penyelesaian terhadap keberatan.

b. Seksi Dana Bagi Hasil

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Seksi Dana Bagi Hasil mempunyai fungsi:

a. Penyusunan Program dan Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
b. Pelaksanaan koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Mengadakan Penyuluhan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain.
b. Mengadakan Pemeriksaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain.
c. Juru Sita Pajak Daerah.
d. Arsiparis dan Pustakawan.

7. Sumber Daya Manusia

Sebagai Dinas Teknis di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bidang Pendapatan Daerah, diperlukan sumber daya manusia yang handal dan professional sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok tersebut.

4.1.4 Aktivitas DinasPemerintah Kota Bandung

1. Melaksanakan kegiatan pendaftaan wajib pajak
2. Melaksanakan kegiatan menghitung potensi pajak
3. Melaksanakan kegiatan pembukuan dan pelaporan wajib pajak
4. Melaksanakan kegiatan penagihan pajak
5. Melaksanakan kegiatan atau melayani kegiatan dari wajib pajak
6. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan
7. Melaksanakan kegiatan dan penggalian potensi pajak
8. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, baik langsung maupun tidak langsung dengan melalui berbagai media
9. Melaksanakan berupa proyek Peningkatan Sumber Asli Daerah
10. Melaksanakan kegiatan penyempurnaan sistem mekanisme kerja dan perubahan obyek serta subyek PBB
11. Melaksanakan kegiatan proyek penyusunan data base PAD
12. Melaksanakan kegiatan proyek penyempurnaan pengolahan data pajak
13. Melaksanakan kegiatan proyek penyempurnaan administrasi dan klarivikasi perhitungan data pajak
14. Melaksanakan kegiatan proyek penataan kearsipan data pajak

15. Melaksanakan kegiatan proyek penyempurnaan organisasi Dinas Pendapatan Daerah
16. Melaksanakan kegiatan proyek penataan ruang kantor Dipenda
17. Melaksanakan kegiatan proyek pengadaan hardware pada payment point PLN

4.2 Karakteristik Responden

Data responden yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebanyak 21 responden yang masing-masing responden memeriksa 2 Dinas Di Pemerintah Kota Bandung. Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut:

a. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase %
Laki - Laki	**16**	**76.19%**
Perempuan	**5**	**23.81%**
Total	**21**	**100%**

(Sumber: data diolah, 2011)

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa auditor yang berada di Inspektorat Kota Bandungyang terpilih sebagai responden tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu.

Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukan bahwa responden yang berjenis kelamin pria sebesar 76.19%, dan responden yang berjenis kelamin wanita sebesar 23.81% jadi dapat disimpulkan mayoritas responden dalam penelitian ini adalah pria.Hal ini menunjukan bahwa tuntutan sebagai seorang auditor membutuhkan stamina yang prima dan dengan beban pekerjaan yang banyak dan tekanan terhadap pekerjaan yang tinggi dan juga waktu bekerja yang tidak harus berada dikantor.

b. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2

Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase %
<30 Tahun	**2**	**9.52%**
31 -40 Tahun	**17**	**80.96%**
41 -50 Tahun	**2**	**9.52%**
>50 Tahun	**0**	**0%**
Total	**21**	**100%**

(Sumber: data diolah, 2011)

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang berusia <30 tahun berjumlah 2 orang atau sebesar 9.52%, 31- 40 tahun berjumlah 17 orang atau sebesar 80.96%, 41-50 tahun berjumlah 2 orang atau sebesar 9.52%, >50

tahun berjumlah 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 31-40 tahun. Hal ini menunjukan bahwa usia produktiv untuk bekerja dan memiliki semangat bekerja dalam kisaran umur 31 – 40 tahun diatas umur ini semangat kerja biasanya berkurang dikarenakan menurunnya stamina dari para pegawai.

c. Profil Pendidikan Terakhir Responden

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3sebagai berikut:

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase %
SMA atau Sederajat	0	0%
Diploma III	0	0%
Strata I (S1)	15	71.43%
Strata II (S2)	6	28.57%
Total	21	100%

(Sumber: data diolah, 2011)

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa pendidikan terakhir auditor yang berada di Inspektorat Kota Bandung yang terpilih sebagai responden mayoritas berpendidikan Strata 1 (S1) dengan jumlah 15 orang atau sebesar 71.43%, Diploma III sebanyak 0orang atau 0% dan Strata II (S2) sebanyak 6orang atau sebesar 28.57%. hal ini dikarenakan bahwa setiap pegawai yang masuk dalam kantor Inspektorat Kota Bandung harus mempunyai pendidikan minimal

strata I (S1) karena seseorang yang memiliki pendidikan terakhir S1 dianggap memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan pendidikan dibawahnya.

d. Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.4 pada halaman berikutnya dijelasakan seberapa lama auditor mayoritas lamanya bekerja sebagai berikut :

Tabel 4.4
Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Lama Bekerja	Jumlah Responden	Persentase %
s/d 1 Tahun	0	0%
1– 5 Tahun	7	33.33%
5 – 10 Tahun	11	52.38%
>10 Tahun	3	14.29%
Jumlah	21	100%

(Sumber: data diolah, 2011)

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden yang bekerja dengan lama kerja 1–5 tahun sebanyak 7 orang atau sebesar 33.33% dan responden dengan lama kerja 5–10 tahun sebanyak 11 orang atau sebesar 52.38%, dan responden dengan lama kerja lebih dari 10 tahun sebanyak 3 orang atau sebesar 14.29%.Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini dengan lama kerja paling banyak 5-10 tahun. Hal ini disebabkan kuisioner yang dibagikan kepada pegawai Auditor Inspektorat Kota Bandung pada Inspektorat Kota Bandung lebih banyak berumur 31-40 tahun. Selain itu rata-rata usia pegawai Auditor Inspektorat Kota Bandung padaInspektorat Kota Bandung rata-rata telah bekerja antara 5-10 tahun.

4.3 Analisis Deskriptif

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 42 orang responden. Untuk mendapatkan gambaran AuditKinerja Sektor Publik, Indepedensi Auditor dan Akuntabilitas Publikdilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas ketiga variabelpada tabel berikut:

Tabel 4.5
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden MengenaiAudit Kinerja Sektor Publik, Indepedensi Auditor dan Akuntabilitas Publik

No	Variabel	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1.	Audit Kinerja Sektor Publik	531	840	63.2%	CukupBaik
2.	Indepedensi Auditor	487	630	77.3%	Baik
3.	Akuntabilitas Publik	2303	2940	78.4%	Baik
	Total	3377	4410	73.00%	Baik

(Sumber: data diolah, 2011)

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan AuditKinerja Sektor Publik, Indepedensi Auditor dan Akuntabilitas Publik sudahbaik.Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai pelaksanaan AuditKinerja Sektor Publik, Indepedensi Auditor dan Akuntabilitas Publik berdasarkan tiap variabel tersebut :

4.3.1 Analisis Deskriptif Audit KinerjaSektor Publik Pada Dinas Pemerintah Kota Bandung

Audit kinerja sektor publik pada Dinas Pemerintah Kota Bandung diukur menggunakan 4 indikator dan dioperasionalisasikan menggunakan 4 butir pernyataan, setiap butir pernyataan disertai dengan 5 pilihan jawaban yang terdiri dari kuesioner negatif yang diberi bobot 1 sampai 5. Berikut ini diuraikan gambaran jawaban responden mengenai audit kinerja sektor publik pada Dinas Pemerintah Kota Bandung berdasarkan indikator sebagai berikut :

Tabel 4.6

Distribusi Jawaban Responden Mengenai Audit Kinerja Sektor Publik

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
1	Pekerjaan harus direncanakan secara memadai	F	2	10	19	5	6	129
		%	4.3	23.8	45.2	11.9	14.3	100%
2	Staf harus disupervisi dengan baik	F	15	4	10	2	11	116
		%	35.7	9.5	23.8	4.8	26.2	100%
3	Bukti yang cukup kompeten dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi	F	1	6	2	15	18	169
		%	2.4	14.3	4.8	35.7	42.9	100%
4	Membuat simpulan hasil audit dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kepada pengelola entitas yang di audit	F	2	27	2	0	11	117
		%	4.8	64.3	4.8	0	26.2	100%
Total		F	20	47	33	22	46	531
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 63.02%								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.6 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{531}{4x5x42} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{531}{840} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 63.02\%$$

Persentase total skor tanggapan responden atas variable diatas sebesar 63.02%, bila merujuk pada tabel 4.6 termasuk dalam kategori cukup baik.

Skor total untuk audit kinerja sektor publik adalah 531. Jumlah skor tersebut dimasukkan ke dalam garis kontinum, yang pengukurannya ditentukan dengan cara :

- Nilai Indeks Maksimum = 5 x 4 x 42 = 840
- Nilai Indeks Minimum = 1 x 4 x 42 = 168
- Jarak Interval = [nilai maksimum - nilai minimum] : 5

  = (840 – 168) : 5

  = 134.4

Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang diperoleh 531 atau 63.02% dari skor ideal yaitu 840. Dengan demikian audit kinerja sektor publik berada pada kategori cukup baik, sesuai dengan teori yang ada dalam table 3.9 menyatakan bahwa angka 52.1 - 68.00 masuk dalam kategori cukup baik.ini menandakan fenomena yang ada masih terjadi dan betul adanya.

a. Pekerjaan harus direncanakan secara memadai

Gambaran tanggapan responden yang menjawab pertanyaan pekerjaan harus direncanakan secara memadai sebagai berikut:

Tabel 4.7

Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Pekerjaan Harus Direncanakan Secara memadai

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
1	Pekerjaan harus direncanakan secara memadai	F	2	10	19	5	6	129
		%	4.3	23.8	45.2	11.9	14.3	100%

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada table 4.7 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{129}{1x5x42} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{129}{} \text{ x } 100\%$$

% skor tanggapan responden = 210.000 / 61.04%

persentase total skor tanggapan responden atas indicator sebesar 61.04% bila merujuk pada table 4.7 termasuk katagori cukup baik, sesuai dengan teori yang ada dalam table 3.9 menyatakan bahwa angka 52.1 - 68.00 masuk dalam kategori cukup baik. Dilihat tanggapan responden mayoritas (45.2%) mengatakan prosedur pengumpulan dokumen –dokumen cukup rumit bila dikaitkan dengan fenomena yang terjadi pada variable audit kinerja sektor publik ini menandakan bahwa prosedur pengumpulan dokumen- dokumen pengauditan masih rumit yang mengakibatkan pelaksanaan audit berjalan dengan lambat.

b. Staf harus di supervisi dengan baik

Tanggapan responden mengenai jawaban indikator staf harus disupervisi dengan baik sebagai berikut:

Tabel 4.8

Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Staf Harus Di Supervisi Dengan Baik

2	Staf harus disupervisi dengan baik	**F**	15	4	10	2	11	116
		%	35.7	9.5	23.8	4.8	26.2	100%

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada table 4.8 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{116}{1x5x42} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{116}{210} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 55.02\%$$

persentase total skor tanggapan responden diatas indicator sebesar 55.02% bila merujuk pada table 4.8 termasuk katagori cukup. Dilihat tanggapan responden mayoritas (55.02%) hal ini menunjukan bahwa pengawasan yang dilakukan supervisor kepada auditor masih kurang hal ini diperjelas dengan banyaknya mayoritas responden menjawab pengawasan sebanyak 1-3 kali sebesar (35.7) sedangkan yang menjawab lebih dari 12 kali hanya sebesar 11 responden (26.2%).dengan adanya tanggapan responden mengenai staf harus disupervisi dengan baik menunjukan bahwa indikator ini memberikan fenomena baru tentang staf yang ahrus di supervise masih bermasalah.

c. Bukti yang cukup kompeten dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi

Tanggapan responden mengenai jawaban indikator bukti yang cukup kompeten sebagai berikut:

Tabel 4.9

Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Bukti yang cukup kompeten dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi

3	Bukti yang cukup kompeten dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi	**F**	1	6	2	15	18	169
		%	2.4	14.3	4.8	35.7	42.9	100%

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada table 4.9 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{169}{1x5x42} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{169}{210} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 80.05\%$$

persentase total skor tanggapan responden diatas indicator sebesar 80.05% bila merujuk pada table 4.9 termasuk katagori baik. Dilihat tanggapan responden mayoritas (80.05%) menjawab bahwa bukti yang di dapat untuk menjadi dasar bagi temuan dan rekomendasi sudah baik dari segi relevan dan kompeten.Sedangkan responden yang beranggapan bahwa bukti yang di dapat untuk menjadi dasar bagi temuan dan rekomendasi tidak kompeten dan relevan hanya sebesar (2.4%).dapat disimpulkan bahwa bukti bagi temuaan dan rekomendasi harus relevan dan kompeten bagi entitas yang diperiksa.

d. Membuat simpulan hasil audit dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kepada pengelola entitas yang di audit.

Tanggapan responden mengenai jawaban indikator membuat simpulan hasil audit dan memberikan rekomendasi kepada pengelola entitas yang diaudit pada halaman selanjutnya sebagai berikut:

Tabel 4.10

Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Membuat simpulan hasil audit dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kepada pengelola entitas yang di audit

4	Membuat simpulan hasil audit dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kepada pengelola entitas yang di audit	**F**	2	27	2	0	11	117
		%	4.8	64.3	4.8	0	26.2	100%

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada table 4.10 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{117}{1x5x42} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{117}{210} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 55.07\%$$

persentase total skor tanggapan responden diatas sebesar 55.07% bila merujuk pada table 4.10 termasuk katagori cukup. Dilihat tanggapan responden mayoritas (55.07%).mayoritas responden menjawab wajar dengan pengecualian sehingga entitas yang diaudit perlu di beri masukan sebesar (64.3%).ini bisa disebabkan masih banyaknya entitas yang di audit masih bermasalah dilihat dari banyaknya auditor yang memberikan simpulan hasil audit wajar dengan pengecualian sehingga entitas yang diaudit perlu di beri masukan.

4.3.2 Analisis Deskriptif Indepedensi Auditor Pada Dinas Pemerintah Kota Bandung

Indepedensi auditor pada Dinas Pemerintah Kota Bandung diukur menggunakan 3 indikator dan dioperasionalisasikan menggunakan 3 butir pernyataan, setiap butir pernyataan disertai dengan 5 pilihan jawaban yang terdiri kuesioner positif yang diberi bobot 5 sampai 1 dan kuesioner negatif yang diberi bobot 1 sampai 5. Berikut ini diuraikan gambaran jawaban responden mengenai indepedensi auditor pada Dinas Pemerintah Kota Bandung berdasarkan indikator sebagai berikut :

Tabel 4.11
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Independensi Auditor

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
5	Menghindari upaya meminta dan atau mencari informasi diluar konteks pelaksanaan	F	0	13	15	11	3	130
		%	0	31.0	35.7	26.2	7.1	100%
6	Tidak mengkomunikasikan aspek temuan dan/atau hasil audit kepada pihak lain yang tidak ada hubunganya dengan pelaksanaan tugas	F	0	0	2	8	32	198
		%	0	0	4.8	19.0	76.2	100%
7	Menghindari permintaan pelayanan dan fasilitas kepada auditanbaik kepentingan kolektif maupun bersifat pribadi	F	5	0	9	13	15	159
		%	11.9	0	21.4	31.0	35.7	100%
Total		F	5	13	26	32	50	487
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 77.03%								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.11 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{487}{3x5x42} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{487}{630} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 77.03\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 77.03% termasuk dalam kategori baik.

Skor total untuk Independensi Auditor adalah 487.Jumlah skor tersebut dimasukkan ke dalam garis kontinum, yang pengukurannya ditentukan dengan cara :

- Nilai Indeks Maksimum = 5 x 3 x 42 = 630
- Nilai Indeks Minimum = 1 x 3 x 42 = 126
- Jarak Interval = [nilai maksimum - nilai minimum] : 5
  = (630 – 126) : 5
  = 100.8

Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang diperoleh 487 atau 77.03% dari skor ideal yaitu 630. Dengan demikian Independensi Auditor berada pada kategori baik. sesuai dengan teori yang ada dalam table 3.9 menyatakan bahwa angka 68.01 - 84.00 masuk dalam kategori baik.

a. Menghindari upaya meminta dan atau mencari informasi diluar konteks pelaksanaan

Tanggapan responden mengenai jawaban indikator menghindari upaya meminta dan atau mencari informasi di luar konteks pelaksanaan sebagai berikut:

Tabel 4.12
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Menghindari upaya meminta dan atau mencari informasi diluar konteks pelaksanaan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
5	Menghindari upaya meminta dan atau mencari informasi diluar konteks pelaksanaan	F	0	13	15	11	3	130
		%	0	31.0	35.7	26.2	7.1	100%

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada table 4.12 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{130}{1x5x42} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{130}{210} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 61.09\%$$

persentase total skor tanggapan responden diatas sebesar 61.09% bila merujuk pada table 4.12 termasuk katagori cukup. Dilihat tanggapan responden mayoritas (61.09%). sesuai dengan teori yang ada dalam table 3.9 menyatakan bahwa angka 52.1 - 68.00 masuk dalam kategori cukup baik, Mayoritas jawaban (35.7%) menunjukkan bahwa auditee memberikan fasilitas yang cukup kepada auditor, tapi bila dilihat lebih lanjut masih ada responden (7.1%) yang menjawab masih ada auditee yang memberikan fasilitas yang berlebihan kepada auditor, sehingga apabila di kaitkan dengan fenomena yang ditemukan dapat menjadi indikasi bahwa masi terdapat auditor yang menerima fasilitas berlebihan dari auditee yang bisa saja terlihat sebagai tindak penyuapan.

b. Tidak mengkomunikasikan aspek temuan dan/atau hasil audit kepada pihak lain yang tidak ada hubunganya dengan pelaksanaan tugas

Tanggapan responden mengenai jawaban indikator tidak mengkomunikasikan aspek temuan dan atau hasil audit kepada pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas sebagai berikut:

Tabel 4.13

Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Tidak mengkomunikasikan aspek temuan dan/atau hasil audit kepada pihak lain yang tidak ada hubunganya dengan pelaksanaan tugas

6	Tidak mengkomunikasikan aspek temuan dan/atau hasil audit kepada pihak lain yang tidak ada hubunganya dengan pelaksanaan tugas	**F**	0	0	2	8	32	198
		%	0	0	4.8	19.0	76.2	100%

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada table 4.13 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{198}{1x5x42} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{198}{210} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 94.03\%$$

persentase total skor tanggapan responden diatas sebesar 94.03% bila merujuk pada table 4.13 termasuk katagori sangat baik. Dilihat tanggapan responden mayoritas (76.02%) menjawab bahwa temuan atas laporan hasil audit sangat terjaga kerahasiaanya dari pihak lain yang tidak ada hubunganya, bila dilihat dari jawaban auditor member indikasi bahwa auditor telah menjalankan tugasnya sesuai dengan yang terdapat pada kode etik auditor.

c. Menghindari permintaan pelayanan dan fasilitas kepada auditan baik kepentingan kolektif maupun bersifat pribadi.

Tanggapan responden mengenai jawaban indikator menghindari permintaan pelayanan dan fasilitas kepada auditan baik kepentingan kolektif maupun bersifat pribadi di halaman selanjutnya sebagai berikut :

Tabel 4.14

Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Menghindari Permintaan Pelayanan dan Fasilitas Kepada Auditan Baik Kepentingan Kolektif Maupun Bersifat Pribadi

7	Menghindari permintaan pelayanan dan fasilitas kepada auditanbaik kepentingan kolektif maupun bersifat pribadi	**F**	5	0	9	13	15	159
		%	11.9	0	21.4	31.0	35.7	100%

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada table 4.14 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{159}{1x5x42} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{159}{210} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 75.07\%$$

persentase total skor tanggapan responden diatas sebesar 75.07% bila merujuk pada table 4.14 termasuk katagori baik. Dilihat tanggapan responden mayoritas menjawab selalu menghindari meminta atau mencari informasi sebesar (35.7%) dan (31.0%) menjawab menghindari atau mencari informasi.hal ini diperjelas dengan tidak adanya responden yang menjawab tidak menghindari meminta atau mencari informasi.ini menyatakan bahwa auditor telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan adanya peraturan dalam kode

etik auditor bahwa auditor dilarang mengkomunikasikan aspek menjawab hasil temuan kepada auditan sebelum dikeluarkan opini oleh BPK.

4.3.3 Analisis Deskriptif Akuntabilitas Publik Pada Dinas Pemerintah Kota Bandung

Akuntabilitas Publik pada Dinas Pemerintah Kota Bandung diukur menggunakan 5 dimensi yang masing – masing dimensi dipecah menjadi 14 indikator dan dioperasionalisasikan menggunakan 14 butir pernyataan, setiap butir pernyataan disertai dengan 5 pilihan jawaban yang terdiri kuesioner positif yang diberi bobot 5 sampai 1 dan kuesioner negatif yang diberi bobot 1 sampai 5. Berikut ini diuraikan gambaran jawaban responden mengenai akuntabilitas publik pada Dinas Pemerintah Kota Bandung berdasarkan indikator sebagai berikut:

Tabel 4.15
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Akuntabilitas Publik

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
8	Kepatuhan terhadap hukum	F	0	6	19	16	1	138
		%	0	4.8	38.1	35.7	21.4	100%
9	Peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi	F	2	0	6	20	14	170
		%	4.8	0	14.3	47.6	33.3	100%
10	Penghindaran penyalahgunaan jabatan	F	0	0	4	20	18	182
		%	0	0	9.5	47.6	42.9	100%
11	Penghindaran korupsi	F	0	0	4	27	11	175
		%	0	0	9.5	64.3	26.2	100%
12	Penghindaran kolusi	F	0	0	5	19	18	181

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
		%	0	0	14.3	42.9	42.9	100%
13	Pengelolaan oraganisasi secara efektif	F	0	2	15	20	5	154
		%	0	4.8	35.7	47.6	11.9	100%
14	Pengelolaan organisasi secara efisien	F	0	0	5	21	16	179
		%	0	0	11.9	50.0	38.1	100%
15	Alternative program yang memberikan hasil yang optimal	F	2	0	7	26	7	162
		%	4.8	0	16.7	61.9	16.7	100%
16	Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat	F	0	0	2	30	10	176
		%	0	0	4.8	71.4	23.8	100%
17	Pertangung jawaban publik atas kebijakan yang diambil	F	0	3	12	18	9	159
		%	0	7.1	28.6	42.9	21.4	100%
18	Pertanggung jawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi,efisien,efektif	F	0	2	19	9	12	157
		%	0	4.8	45.2	21.4	28.6	100%
19	Pertanggung jawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi,efisien,efektif	F	0	0	21	16	5	152
		%	0	0	50.0	38.1	11.9	100%
20	Pertanggung jawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi,efisien,efektif	F	2	5	14	12	9	147
		%	4.8	11.9	33.3	28.6	21.4	100%
21	Pertanggung jawaban lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial	F	0	0	13	10	19	174
		%	0	0	31.0	23.8	45.2	100%
Total		F	6	14	144	262	162	2306
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 78.04%								

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.15 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{2306}{14x5x42} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{2306}{2940} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 78.04\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 78.04%, bila merujuk pada tabel 4.15 termasuk dalam kategori baik.

Skor total untuk akuntabilitas publik adalah 2306. Jumlah skor tersebut dimasukkan ke dalam garis kontinum, yang pengukurannya ditentukan dengan cara :

- Nilai Indeks Maksimum = 5 x 14 x 42 = 2940
- Nilai Indeks Minimum = 1 x14 x 42 = 588
- Jarak Interval = [nilai maksimum - nilai minimum] : 5

  = (2940– 588) : 5

  = 470.4

Dari perhitungan dalam tabel menunjukkan nilai yang diperoleh 2306 atau 78.04% dari skor ideal yaitu 2940. sesuai dengan teori yang ada dalam table 3.9 menyatakan bahwa angka 68.01 - 84.00 masuk dalam kategori baik. Dengan demikian akuntabilitas publik berada pada kategori baik bila merujuk pada fenomena yang ada bahwa fenomena tidak terjawab dikarenakan fenomena yang

terdapat dalam akuntabilitas public terjadi pada tahun 2009 sedangkan peneliti melakukan penelitian pada 2011 dalam konteks pelaksanaan akuntabilitas public seiring berjalannya waktu mengalami perubahan kearah yang lebih baik sehingga fenomena di tahun 2009 sudah ditangani dengan baik ditahun sekarang.

a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Tanggapan responden mengenai jawaban indikator akuntabilitas hukum dan kejujuran sebagai berikut :

Tabel 4.16
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Hukum Dan Kejujuran

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
8	Kepatuhan terhadap hukum	F	0	6	19	16	1	138
		%	0	4.8	38.1	35.7	21.4	100%
9	Peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi	F	2	0	6	20	14	170
		%	4.8	0	14.3	47.6	33.3	100%
10	Penghindaran penyalahgunaan jabatan	F	0	0	4	20	18	182
		%	0	0	9.5	47.6	42.9	100%
11	Penghindaran korupsi	F	0	0	4	27	11	175
		%	0	0	9.5	64.3	26.2	100%
12	Penghindaran kolusi	F	0	0	5	19	18	181
		%	0	0	14.3	42.9	42.9	100%

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.16 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{846}{5x5x42} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{846}{1050} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 80.57\%$$

persentase total skor tanggapan responden diatas sebesar 80.57%, sesuai dengan teori yang ada dalam table 3.9 menyatakan bahwa angka 68.01 - 84.00 masuk dalam kategori baik. bila merujuk pada table 4.16 termasuk katagori baik.dari jawaban responden atas Peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, Penghindaran penyalahgunaan jabatan,Penghindaran korupsi, Penghindaran kolusi rata - rata responden menunjukan dalam kategori baik, namun dari segi kepatuhan terhadap hukum masih menunjukan kategori cukup apabila dikaitkan dengan fenomena yang ada menunjukan fenomena tidak terjawab dikarenakan fenomena yang terdapat dalam akuntabilitas public terjadi pada tahun 2009 sedangkan peneliti melakukan penelitian pada 2011 dalam konteks pelaksanaan akuntabilitas public seiring berjalannya waktu mengalami perubahan kearah yang lebih baik sehingga fenomena di tahun 2009 sudah ditangani dengan baik ditahun sekarang.

b. Akuntabilitas manajerial

Tanggapan responden mengenai jawaban indikator akuntabilitas manajerial sebagai berikut :

Tabel 4.17
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Manajerial

13	Pengelolaan oraganisasi secara efektif	**F**	0	2	15	20	5	154
		%	0	4.8	35.7	47.6	11.9	100%
14	Pengelolaan organisasi secara efisien	**F**	0	0	5	21	16	179
		%	0	0	11.9	50.0	38.1	100%

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.17 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{333}{2x5x42} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{333}{420} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 79.28\%$$

persentase total skor tanggapan responden diatas sebesar 79.28% bila merujuk pada table 4.17 termasuk katagori baik.mayoritas jawaban responden menjawab (47.6%) pengelolaan organisasi secara efektif telah dilakukan secara efektif dan (50%) menjawab pengelolaan organisasi secara efisien dibutuhkan .

c. Akuntabilitas program

Tanggapan responden mengenai jawaban indikator akuntabilitas program sebagai berikut :

Tabel 4.18
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Program

15	Alternative program yang ada	**F**	2	0	7	26	7	162
		%	4.8	0	16.7	61.9	16.7	100%
16	Hasil/output yang telah dibuat	**F**	0	0	2	30	10	176
		%	0	0	4.8	71.4	23.8	100%

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.18 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus dihalaman selanjutnya sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{338}{2x5x42} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{338}{420} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 80.48\%$$

persentase total skor tanggapan responden diatas sebesar 80.48% bila merujuk pada table 4.18 termasuk katagori baik. Mayoritas jawaban responden menjawab (61.9) alternative program yang ada memberikan hasil yang optimal dan (71.4%) menjawab bahwa hasil output yang telah dibuat dapat dipertanggung jawabkan. Dapat disimpulkan bahwa dari segi akuntabilitas program entitas pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

d. Akuntabilitas kebijakan

Tanggapan responden mengenai jawaban indikator akuntabilitas kebijakan sebagai berikut :

Tabel 4.19
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Kebijakan

17	Pertangung jawaban publik atas kebijakan yang diambil	**F**	0	3	12	18	9	159
		%	0	7.1	28.6	42.9	21.4	100%

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.19 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus dihalaman selanjutnya sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{159}{1x5x42} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{159}{210} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 75.71\%$$

persentase total skor tanggapan responden diatas sebesar 75.1% bila merujuk pada table 4.19 termasuk katagori baik.mayoritas responden sebesar (42.9%) menjawab bahwa pertanggung jawaban publik atas kebijakan yang diambil dapat dipenuhi oleh entitas publik.sedangkan sebagian responden masih ada yang menjawab (28.6%) cukup dapat mempertanggungjawabkan.dapat disimpulkan bahwa entitas pemerintah telah melakukan pertanggungjawabannya kepada pihak pemberi amanat.

e. Akuntabilitas financial

Tanggapan responden mengenai jawaban indikator akuntabilitas financial sebagai berikut :

Tabel 4.20
Gambaran Tanggapan Responden Mengenai Akuntabilitas Finansial

18	Pertanggung jawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi,efisien,efektif	**F**	0	2	19	9	12	157
		%	0	4.8	45.2	21.4	28.6	100%
19	Pertanggung jawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi,efisien,efektif	**F**	0	0	21	16	5	152
		%	0	0	50.0	38.1	11.9	100%
20	Pertanggung jawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi,efisien,efektif	**F**	2	5	14	12	9	147
		%	4.8	11.9	33.3	28.6	21.4	100%
21	Pertanggung jawaban lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial	**F**	0	0	13	10	19	174
		%	0	0	31.0	23.8	45.2	100%

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.20 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{630}{4x5x42} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{630}{840} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 75.00\%$$

persentase total skor tanggapan responden diatas sebesar 75.00% bila merujuk pada table 4.20 termasuk katagori baik.tetapi masih terdapat beberapa responden yang menjawab bahwa Pertanggung jawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi,efisien,efektif para reponden

menjawab cukup ekonomis, efektiv, dan efisien. Ini menandakan bahwa belum semua entitas publik menjalankan akuntabilitas secara optimal.sedangkan dari sisi Pertanggung jawaban lembaga- lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial sebesar (45.2%) menjawab sangat dibutuhkan yang menunjukan akuntabilitas lembaga publik diperlukan pembuatan laporan kuangan untuk memberikan bukti kepada pemeriksa apakah kinerja entitas pemerintah dalam satu tahun baik atau buruk bisa dilihat dalam laporan keuangan tahunnan.

4.3.4 Pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik Dan Indepedensi Auditor Terhadap Akuntabilitas Publik Survey Pada Dinas Pemerintah Kota Bandung.

Pada bagian ini akan diuji pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik dan Indepedensi Auditor terhadap Akuntabilitas Publik survey pada Dinas Pemerintah Kota Bandung menggunakan regresi linear berganda. Data yang digunakan dalam analisis regresi pada penelitian ini berdasarkan data 21 responden yang masing-masing responden memeriksa 2 dinas sehinga menjadi 42 responden. Karena skor jawaban responden masih berbentuk skala pengukuran ordinal, maka agar dapat diolah menggunakan analisis regresi linier terlebih dahulu data ordinal tersebut dikonversi menjadi skala interval melalui *method of succesive interval.*

4.3.5 Hasil Analisis Regresi Berganda

Model regresi digunakan untuk menguji perubahan yang terjadi pada Akuntabilitas Publik yang dapat diterangkan atau dijelaskan oleh perubahan kedua variabel independen (Audit Kinerja Sektor Publik Dan Indepedensi Auditor). Sehingga dapat diketahui dan dibuktikan sejauh mana hubungan Audit Kinerja Sektor Publik Dan Indepedensi Auditor Terhadap Akuntabilitas Publik. Dalam perhitungannya penulis menggunakan cara komputerisasi. Cara perhitungan komputerisasi dengan menggunakan media program komputer yaitu *SPSS 14 for windows.*

Model regresi digunakan untuk memprediksi dan menguji perubahan yang terjadi pada Akuntabilitas Publik yang dapat diterangkan atau dijelaskan oleh perubahan kedua variabel independen (Audit Kinerja Sektor Publik Dan Indepedensi Auditor). Berdasarkan perhitungan secara komputerisasi dengan *SPSS 14 for windows* yaitu sebagai berikut dapat dilihat di halaman selanjutnya.

Tabel 4.21
Hasil Perhitungan Koefisien Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.145	.310		.469	.641
	X1 (Auidt Kinerja Sektor Publik)	.441	.125	.391	3.533	.001
	X2 (Indepedensi Auditor)	.514	.106	.536	4.851	.000

a. Dependent Variable: Y (AKUNTABILITAS PUBLIK)

(Sumber: data diolah, 2011)

Melalui hasil regresi yang terdapat pada tabel di atas maka dapat dibentuk sebuah persamaan regresi sebagai berikut:$\mathbf{Y = 0{,}145 + 0{,}441\ X_1 + 0{,}514\ X_2}$

Dimana : Y = Akuntabilitas Publik
X_1= Audit Kinerja Sektor Publik
X_2= Indepedensi Auditor

Nilai konstanta (a) sebesar 0,145 menunjukkan nilai Akuntabilitas Publik apabila tidak dilaksanakan Audit Kinerja Sektor Publik dan Indepedensi Auditor. Nilai koefisien regressi (b_1) sebesar 0,441 menunjukkan peningkatan Akuntabilitas Publik apabila Audit Kinerja Sektor Publik ditingkatkan sebesar satu satuan. Koefisien regresi memiliki tanda positif, artinya semakin baik Audit Kinerja Sektor Publik akan meningkatkan Akuntabilitas Publik. Sebaliknya, semakin kurang baik Audit Kinerja Sektor Publik akan menurunkanAkuntabilitas Publik.Kemudian nilai koefisien regressi (b_2) sebesar 0,514 menunjukkan peningkatan Akuntabilitas Publik apabila Indepedensi Auditor ditingkatkan sebesar satu satuan. Koefisien regresi memiliki tanda positif, artinya semakin baik Indepedensi Auditor akan meningkatkan Akuntabilitas Publik. Sebaliknya, semakin kurang baik Indepedensi Auditor akan menurunkanAkuntabilitas Publik.

4.3.6 Pengujian Asumsi Klasik Regresi

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi regresi untuk mengetahui apakah model yang diperoleh sudah model yang terbaik (tidak bias dengan varian minimum). Ada beberapa asumsi yang akan diuji, diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

4.3.6.1 Uji Asumsi Normalitas

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi, apabila model regresi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan, karena statistik uji F dan uji t pada analisis regresi diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas model regresi

Tabel 4.22

Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.40950525
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.084
	Negative	-.068
Kolmogorov-Smirnov Z		.545
Asymp. Sig. (2-tailed)		.927

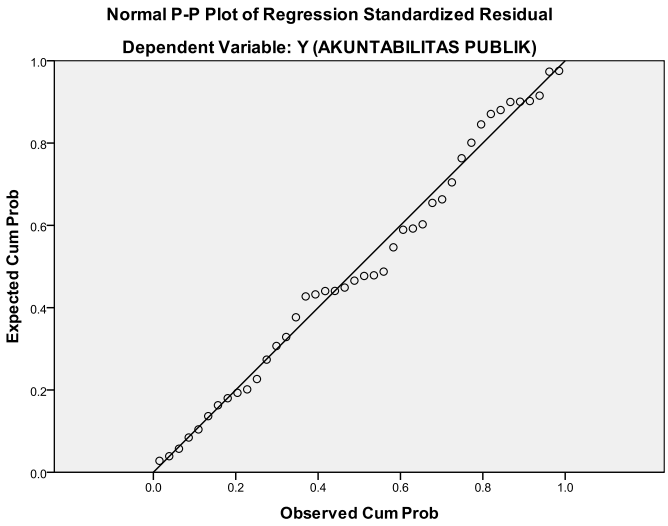
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

(Sumber: data diolah, 2011)

Pada tabel 4.22 dapat dilihat nilai probabilitas (signifikansi) yang diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,927. Karena nilai probabilitas pada uji Kolmogorov-Smirnov masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0.05), maka disimpulkan bahwa model regressi berdistribusi normal.

Cara lain untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak adalah dengan melihat grafik *normal P Plot of Regression Statistic*. Bila titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, berarti

model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.1
Grafik Normal P-Plot (Asumsi Normalitas)

Dari grafik normal P-Plot tersebut terlihat bahwa titik-titik tidak menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sehingga dalam penelitian tidak terjadi gangguan normalitas, yang berarti data berdistribusi normal.

4.3.6.2 Uji Asumsi Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel independen pada model regresi. Jika terdapat multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar tetapi pada pengujian parsial, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini

digunakan nilai *variance inflation factors* (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel independen.

Tabel 4.23

Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1 (AUIDT KINERJA SEKTOR PUBLIK)	.666	1.503
	X2 (INDEPEDENSI AUDITOR)	.666	1.503

a. Dependent Variable: Y (AKUNTABILITAS PUBLIK)

(Sumber: data diolah, 2011)

Berdasarkan nilai VIF seperti terlihat pada tabel 4.23 diatas menunjukkan tidak ada korelasi yang kuat antara sesama variabel independen, dimana nilai VIF dari kedua variabel independen masih lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara kedua variabel independen.

4.3.6.3 Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian dari residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan uji *rank Spearman*, yaitu dengan mengkorelasikan variabel independen terhadap nilai absolut residual (error). Apabila ada koefisien korelasi variabel independen yang signifikan, mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Pada tabel 4.24 berikut dapat dilihat nilai signifikansi masing-masing korelasi variabel independen terhadap nilai absolut dari residual(error).

Tabel 4.24

Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Correlations[a]

			absr	X1 (Auidt Kinerja Sektor Publik)	X2 (Indepedensi Auditor)
Spearman's rho	absr	Correlation Coefficient	1.000	.216	.259
		Sig. (2-tailed)	.	.169	.097
	X1 (AUIDT KINERJA SEKTOR PUBLIK)	Correlation Coefficient	.216	1.000	.504**
		Sig. (2-tailed)	.169	.	.001
	X2 (INDEPEDENSI AUDITOR)	Correlation Coefficient	.259	.504**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.097	.001	.

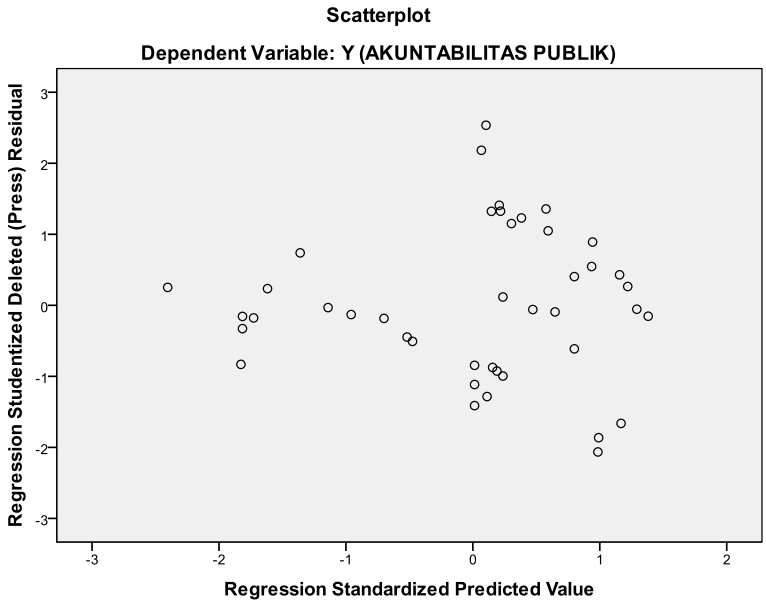
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

a. Listwise N = 42

(Sumber: data diolah, 2011)

Berdasarkan hasil korelasi yang diperoleh seperti dapat dilihat pada tabel 4.24 diatas memberikan suatu indikasi bahwa residual (error) yang muncul dari persamaan regresi mempunyai varians yang sama (tidak terjadi heteroskedastisitas), dimana nilai signifikansi dari masing-masing koefisien korelasi kedua variabel independen dengan nilai absolut error masih lebih besar dari 0,05 (yaitu 0,169dan 0,097).

Cara lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan nilai residualnya (SDRESID). Jika ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi heterokedastisitas. Hasil pengujian heterokedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.2



Gambar 4.2

Grafik Uji Heterokedastisitas

Diperoleh titik-titik data tersebar di atas dan dibawah 0, sehingga disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada persamaan regresi yang diperoleh. Karena ketiga asumsi regresi terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa hasil estimasi model regresi pengaruh audit kinerja sektor publik dan indepedensi auditor terhadap akuntabilitas publik memenuhi syarat BLUE (*best linear unbias estimation)*sehingga layak untuk dilanjutkan pada pengujian hipotesis.

4.4.3 Hubungan Audit Kinerja Sektor Publik, Indepedensi Auditor dan Akuntabilitas Publik Pada Dinas Pemerintah Kota Bandung

Untuk mengetahui keeratan hubungan antara Audit Kinerja Sektor Publik (X_1) dan Indepedensi Auditor (X_2) dengan Akuntabilitas Publik (Y) maka dapat dicari dengan menggunakan analisis korelasi *pearson* (*product*). Korelasi ini digunakan karena teknik statistik ini paling sesuai dengan jenis data skala penelitian yang digunakan yaitu Interval.

Korelasi parsial digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan masing-masing variabel independen (Audit Kinerja Sektor Publik dan Indepedensi Auditor) dengan Akuntabilitas Publik. Melalui korelasi parsial akan dicari pengaruh masing-masing variabel independen terhadap Akuntabilitas Publik ketika variabel independen lainnya konstan.

Perhitungan hubungan audit kinerja,indepedensi auditor dan akuntabilitas publik secara komputerisasi dengan menggunakan *software SPSS 14 for windows* yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.25

***Correlations* Audit Kinerja Sektor Publik, Indepedensi Auditor dan Akuntabilitas Publik**

Correlations[a]

		X1 (AUIDT KINERJA SEKTOR PUBLIK)	X2 (INDEPEDENSI AUDITOR)	Y (AKUNTABILITAS PUBLIK)
X1 (AUIDT KINERJA SEKTOR PUBLIK)	Pearson Correlation	1	.578**	.701**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
X2 (INDEPEDENSI AUDITOR)	Pearson Correlation	.578**	1	.762**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
Y (AKUNTABILITAS PUBLIK)	Pearson Correlation	.701**	.762**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	

Dari hasil perhitungan, diperoleh korelasi Audit Kinerja Sektor Publik dengan Akuntabilitas Publik (rx_1y) sebesar 0,701 dengan arah positif. Korelasi Audit Kinerja Sektor Publik dengan Akuntabilitas Publik masuk dalam ketegori sedang. Nilai rx_1y yang diperoleh positif menunjukkan arah hubungan antara Audit Kinerja Sektor Publik dengan Akuntabilitas Publik berbanding lurus dan berarti jika semakin besar Audit Kinerja Sektor Publikmaka Akuntabilitas Publik diprediksi akan semakin tinggi.

Hasil perhitungan nilai korelasi Indepedensi Auditor dengan Akuntabilitas Publik (rx_2y) diperoleh sebesar 0,762 dengan arah positif. Nilai korelasi Indepedensi Auditor dengan Akuntabilitas Publik masuk dalam ketegori sedang. Dengan arah positif berarti bahwa hubungan antara Indepedensi Auditor dengan Akuntabilitas Publik berbanding lurus, jadi semakin baik Indepedensi Auditor maka Akuntabilitas Publik diprediksi akan semakin baik.

Hasil perhitungan nilai korelasi Audit Kinerja Sektor Publik dan Independensi Auditor (rx_1x_2) dengan arah positif. Nilai korelasi Audit Kinerja Sektor Publik dan Indepedensi Auditor masuk dalam ketegori sangat rendah. Dengan arah positif berarti bahwa hubungan antara Audit Kinerja Sektor Publik dan Indepedensi Auditor berbanding lurus jadi semakin baik Audit Kinerja Sektor Publik maka Indepedensi Auditor akan semakin baik.

Menggunakan nilai koefisien kolerasi antara Audit Kinerja Sektor Publik dengan Akuntabilitas Publik, Indepedensi Auditor dengan Akuntabilitas Publik, dan Audit Kinerja Sektor Publik dan Indepedensi Auditor yang telah diketahui,

dapat diperoleh nilai korelasi parsial antar variabel melalui perhitungan secara komputerisasi yaitu dengan *softwareSPSS 14 for windows* sebagai berikut:

Tabel 4.26

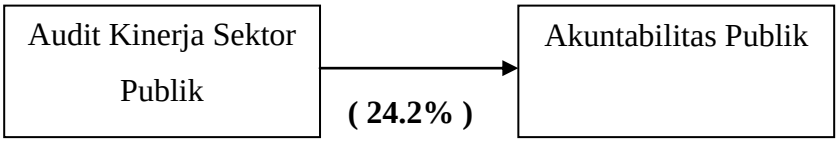
Koefisien Korelasi Parsial Audit Kinerja Sektor Publik Dengan Akuntabilitas Publik

Correlations

Control Variables			X1 (AUIDT KINERJA SEKTOR PUBLIK)	Y (AKUNTABILITAS PUBLIK)
X2 (INDEPEDENSI AUDITOR)	X1 (AUIDT KINERJA SEKTOR PUBLIK)	Correlation	1.000	.492
		Significance (2-tailed)	.	.001
		df	0	39
	Y (AKUNTABILITAS PUBLIK)	Correlation	.492	1.000
		Significance (2-tailed)	.001	.
		df	39	0

(Sumber: data diolah, 2011)

Hubungan antara Audit Kinerja Sektor Publik dengan Akuntabilitas Publik ketika Indepedensi Auditor tidak berubah adalah sebesar 0,492 dengan arah positif. Artinya hubungan antara Audit Kinerja Sektor Publik dengan Akuntabilitas Publik termasuk dalam kategori sedang ketika Indepedensi Auditortidak mengalami perubahan. Ini menggambarkan bahwa ketika Audit Kinerja Sektor Publik semakin baik, sementara Indepedensi Auditor tidak berubah maka akan meningkatkan Akuntabilitas Publik pada Dinas Pemerintah Kota Bandung. Kemudian besar pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Publik pada Dinas Pemerintah Kota Bandung ketika Indepedensi Auditor tetap adalah $(0,492)^2$x 100% = 24,2%.



Gambar 4.3
Korelasi Audit Kinerja Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Publik

1. Korelasi Indepedensi Auditor dengan Akuntabilitas Publik apabila Audit Kinerja Sektor Publik Tidak Berubah (Konstan) dengan perhitungan secara komputerisasi yaitu *SPSS 14 for windows*sebagai berikut:

Tabel 4.27
Koefisien Korelasi Parsial Indepedensi Auditor Dengan Akuntabilitas Publik

Correlations

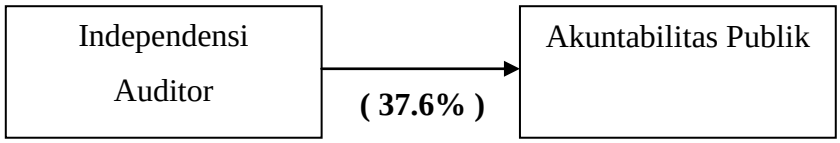
Control Variables			X2 (INDEPEDENSI AUDITOR)	Y (AKUNTABILITAS PUBLIK)
X1 (AUIDT KINERJA SEKTOR PUBLIK)	X2 (INDEPEDENSI AUDITOR)	Correlation	1.000	.613
		Significance (2-tailed)	.	.000
		df	0	39
	Y (AKUNTABILITAS PUBLIK)	Correlation	.613	1.000
		Significance (2-tailed)	.000	.
		df	39	0

(Sumber: data diolah, 2011)

Hubungan antara Indepedensi Auditor dengan Akuntabilitas Publik ketika Audit Kinerja Sektor Publik tidak berubah adalah sebesar 0,613 dengan arah positif. Artinya hubungan antara Indepedensi Auditor dengan Akuntabilitas Publik termasuk dalam kategori sedang ketika Audit Kinerja Sektor Publik tidak mengalami perubahan. Ini menggambarkan bahwa ketika Indepedensi Auditor semakin baik, sementara Audit Kinerja Sektor Publik tidak berubah maka akan meningkatkan Akuntabilitas Publik pada Dinas Pemerintah Kota Bandung.

Kemudian besar pengaruh Indepedensi Auditor terhadap Akuntabilitas Publik pada Dinas Pemerintah Kota Bandung ketika Indepedensi Auditor tetap adalah $(0,613)^2$x 100% = 37,6%.

Berdasarkan hasil perhitungan besar pengaruh/kontribusi masing-masing variabel bebas terhadap akuntabilitas publik maka dapat diketahui bahwa diantara kedua variabel bebas, indepedensi auditor memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap akuntabilitas publik dibanding audit kinerja sektor publik.



Gambar 4.4
Korelasi Independensi Auditor Terhadap Akuntabilitas Publik

2. Korelasi secara simultan audit kinerja sektor publik dan indepedensi auditor terhadap akuntabilitas publik dengan perhitungansecara komputerisasi yaitu dengan mengunakan*software SPSS 15 for windows* sebagai berikut:

Tabel 4.28
Model summary untuk korelasi Audit Kinerja Sektor Publik dan Indepedensi Auditor terhadap Akuntabilitas Publik Pada Dinas Pemerintah Kota Bandung

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.826[a]	.683	.666	.41987

a. Predictors: (Constant), X2 (INDEPEDENSI AUDITOR), X1 (AUIDT KINERJA SEKTOR PUBLIK)
b. Dependent Variable: Y (AKUNTABILITAS PUBLIK)

(Sumber: data diolah, 2011)

Nilai R (0,826) pada tabel 4.28 menunjukkan kekuatan hubungan kedua variabel independen (Audit kinerja danIndepedensi Auditor) secara simultan dengan Akuntabilitas Publik. Jadi diketahui bahwa secara simultan kedua variabel independen (Audit kinerja danIndepedensi Auditor) memiliki hubungan yang kuat dengan kepatuhan Akuntabilitas Publik survey pada Dinas Pemerintah Kota Bandung.

Nilai korelasi *r* hanya menyatakan erat atau tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y. Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen (variabel X) terhadap variabel dependen (variabel Y), digunakan koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang menyatakan besar pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun perhitungan koefisien determinasi dengan menggunakan *softwareSPSS 14* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.29

Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.826[a]	.683	.666	.41987

a. Predictors: (Constant), X2 (INDEPEDENSI AUDITOR), X1 (AUIDT KINERJA SEKTOR PUBLIK)
b. Dependent Variable: Y (AKUNTABILITAS PUBLIK)

(Sumber: data diolah, 2011)

Sementara nilai R-Square sebesar 0,683atau 68,3% menunjukkan bahwa pada Dinas Pemerintah Kota Bandung, variabel Audit Kinerja Sektor Publik dan Indepedensi Auditor secara simultan mampu menerangkan perubahan yang terjadi pada Akuntabilitas Publik sebesar 68,3%. Dengan kata lainAudit Kinerja Sektor Publik dan Indepedensi Auditor secara bersama-sama memberikan kontribusi atau

pengaruh sebesar 68,3% terhadap Akuntabilitas Publik pada Dinas Pemerintah Kota Bandung. Sementara sisanya sebesar 31.7% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diamati diluar variabel Audit Kinerja Sektor Publikdan Indepedensi Auditor. Faktor lain diluar audit kinerja sektor publik dan independensi auditor yang mempengaruhi akuntabilitas publikadalah pelayanan publik, kualitas informasi keuangan, manajerial dan pengwasan fungsional yang mempengaruhi akuntabilitas publik. (jurnal riset akuntansi; volume I/No.2/April 2010).

4.4.4 Pengujian Hipotesis

Selanjutnya diuji pengaruh audit kinerja sektor publik dan indepedensi auditor terhadap akuntabilitas publik, baik secara bersama-sama (simultan) maupun secara parsial (individual). Pengujian dimulai dari pengujian simultan, dan apabila hasil pengujian simultan signifikan dilanjutkan dengan uji parsial.

4.4.4.1 Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial

Pada pengujian koefisien regresi secara parsial akan diuji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Statistik uji yang digunakan pada pengujian parsial adalah uji t. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 2,023 yang diperoleh dari tabel t pada □ = 0.05 dan derajat independen 42 untuk pengujian dua pihak.

1. Pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Publik

Diduga audit kinerja sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pemerintah Kota Bandung, karena dugaan tersebut peneliti menetapkan hipotesis penelitian untuk pengujian dua pihak dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

Ho.$\beta_1 = 0$:	Audit kinerja sektor publik tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pemerintah Kota Bandung
Ha.$\beta_1 \neq 0$:	Audit kinerja sektor publikberpengaruh terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pemerintah Kota Bandung

Perhitungan koefisiensi regresi secara parsial dengan*software* komputerisasi SPSS 15 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.30

Anova Untuk Pengujian Koefisien Regresi secara parsial (Uji t)

Coefficients[a]

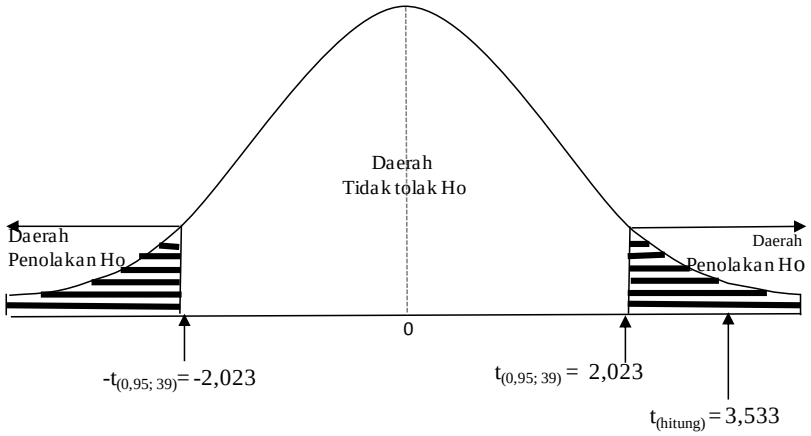
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.146	.310		.471	.640
	Audit_kinerja	.441	.125	.391	3.532	.001
	Indepedensi_Auditor	.514	.106	.536	4.851	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas_Publik

(Sumber: data diolah, 2011)

Berdasarkan data keluaran software SPSS seperti disajikan pada tabel 4.16 diperoleh nilai thitung variabel audit kinerja sektor publik sebesar3,532. Karena

nilai thitung (3,523) lebih besar dari ttabel (2,023) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima, artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa audit kinerja sektor public berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Hasil pengujian inimemberikan bukti empiris bahwa audit kinerja sektor publik yang baik akan meningkatkan akuntabilitas publikpada Dinas Pemerintah Kota Bandung.



Gambar 4.5
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Parsial

Gambar 4.5 menunjukkan bahwa thitung jatuh pada daerah penolakan Ho, sehingga dapat disimpulkan bahwa audit kinerja sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas publikpada Dinas Pemerintah Kota Bandung.

2. Pengaruh Indepedensi Auditor Terhadap Akuntabilitas Publik

Diduga Independensi Auditor berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pemerintah Kota Bandung, karena dugaan tersebut peneliti menetapkan hipotesis penelitian untuk pengujian dua pihak dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

Ho.$\beta_2 = 0$:	Indepedensi auditor tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pemerintah Kota Bandung
Ha.$\beta_2 \neq 0$:	Indepedensi auditor berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pemerintah Kota Bandung

Perhitungan koefisiensi regresi secara parsial dengan*software* komputerisasi SPSS 14 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.31
Anova Untuk Pengujian Koefisien Regresi secara parsial (Uji t)

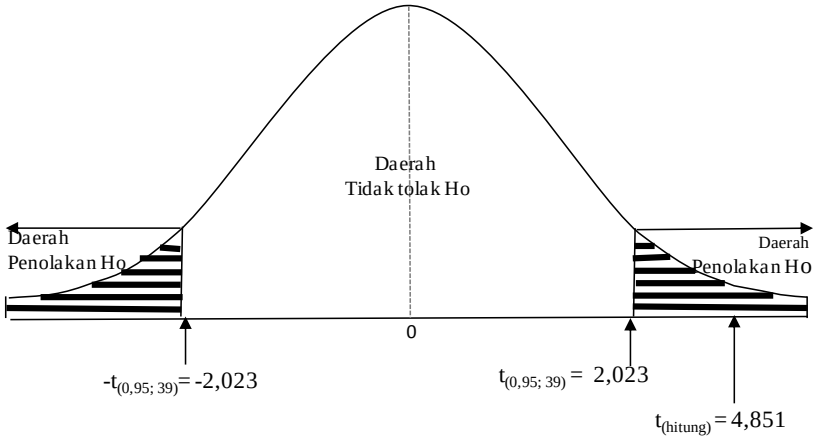
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.146	.310		.471	.640
	Audit_kinerja	.441	.125	.391	3.532	.001
	Indepedensi_Auditor	.514	.106	.536	4.851	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas_Publik

(Sumber: data diolah, 2011)

Berdasarkan data keluaran software SPSS seperti disajikan pada tabel 4.31 diperoleh nilai t_{hitung} variabel indepedensi auditor sebesar 4,851. Karena nilai t_{hitung} (4,851) lebih besar dari t_{tabel} (2,023) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima, artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa indepedensi auditor berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Hasil pengujian ini memberikan bukti empiris bahwa sikap indepedensi yang baik akan meningkatkan perbaikan akuntabilitas publikpada Dinas Pemerintah Kota Bandung.



Gambar 4.6
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Parsial

Gambar 4.6 menunjukkan bahwa thitung jatuh pada daerah penolakan Ho, sehingga dapat disimpulklan bahwa indepedensi auditor berpengaruh terhadap akuntabilitas publikpada Dinas Pemerintah Kota Bandung.

4.4.4.2 Pengujian Koefisien Regresi Secara Simultan

Pengujian secara simultan bertujuan untuk membuktikan apakah audit kinerja sektor publik dan independensi auditor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pemerintah Kota Bandung dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut di halaman selanjutnya :

Ho : Semua □i = 0 i = 1,2	Audit kinerja sektor publik dan indepedensi auditor secara simultan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pemerintah Kota Bandung
Ha : Ada βi ≠ 0 i = 1,2	Audit kinerja sektor publik dan indepedensi auditor secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pemerintah Kota Bandung

Perhitungan koefisiensi regresi secara simultan dengan *software* komputerisasi SPSS 14 yaitu di halaman selanjutnya sebagai berikut:

Tabel 4.32

Anova Untuk Pengujian Koefisien Regresi secara simultan (Uji F)

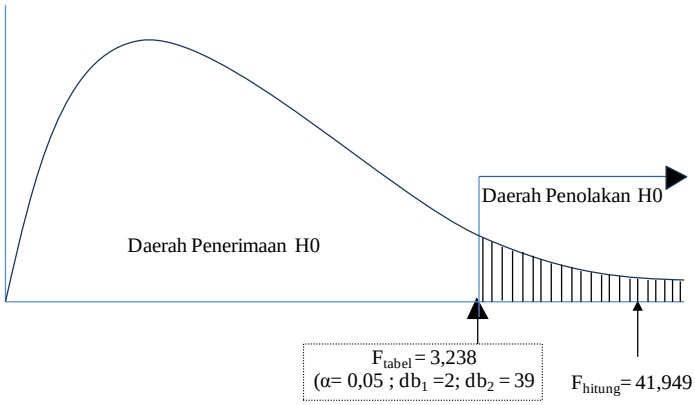
ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14.791	2	7.395	41.949	.000[a]
	Residual	6.875	39	.176		
	Total	21.666	41			

a. Predictors: (Constant), X2 (INDEPEDENSI AUDITOR), X1 (AUIDT KINERJA SEKTOR PUBLIK)
b. Dependent Variable: Y (AKUNTABILITAS PUBLIK)

(Sumber: data diolah, 2011)

Berdasarkan tabel anova di atas dapat dilihat nilai Fhitung dari hasil pengolahan data sebesar 41,949 dan nilai ini menjadi statistik uji yang akan dibandingkan dengan nilai F dari tabel. Dari tabel F pada □ = 0.05 dan derajat bebas (2;42) diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,023. Karena Fhitung (41,949) lebih besar dari Ftabel (2,023) maka pada tingkat kekeliruan 5% (□=0.05) diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa audit kinerja sektor publik dan indepedensi auditorsecara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pemerintah Kota Bandung.



Gambar 4.7
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Simultan

Gambar 4.7 menunjukkan bahwa thitung jatuh pada daerah penolakan Ho, sehingga dapat disimpulkan bahwa audit kinerja sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pemerintah Kota Bandung.

Dapat disimpulkan bahwa dari pengujian secara parsial membuktikan bahwa antara audit kinerja sektor publik terhadap akuntabilitas publik berpengaruh dan independensi auditor terhadap akuntabilitas publik pun berpengaruh didorong dengan jurnal yang di dapat oleh peneliti bahwa audit kinerja sektor publik dan independensi auditor secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas publik, ini membuktikan bahwa antar teori penghubung, jurnal dan hasil pengujian hipotesi secara keseluruhan membuktikan bahwa antara audit kinerja sektor publik dan independensi auditor berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.